

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PASAR TERATAI HIGIENIS
MADANI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Windasari
NPM 157310004**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Windasari
NPM : 157310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi Penelitian : Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis
Madani Kota Pekanbaru

Format Sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk sidang ujian konferehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemeritahan
Ketua,

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Pekanbaru, 03 Februari 2021

Pembimbing,



Andriyus., S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Windasari
NPM : 157310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis
Madani Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua,


Andriyus., S.Sos, M.Si

Pekanbaru, 03 Februari 2021
Sekretaris,


Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Anggota,


Dr. Zainal, S.Sos, M.Si

Mengotahui
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 159 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Windasari
N P M : 157310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si. | .Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Januari 2021
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

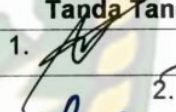
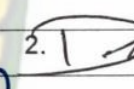

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 27 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 28 Januari 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Windasari
NPM : 157310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 81,2 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 28 Januari 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Windasari
NPM : 157310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis
Madani Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 03 Februari 2021

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,


Andriyus., S.Sos, M.Si


Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Indra Safri., S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga, sahabat, serta teman-teman lainnya dan semoga di ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga selalu tetap tercurahkan buat junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, dan Teman-teman yang istiqomah di jalan Islam.

Dan Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) pada program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yaitu dengan judul **“Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama masa studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Terimakasih Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi, SH., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
2. Terimakasih Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu.
3. Terimakasih Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan menurunkan ilmu

pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini.

4. Terimakasih kepada Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu, memotivasi, mengarahkan, dan menularkan ilmu pengetahuannya kepada penulis serta memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Terimakasih kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin dan pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait penelitian ini.
6. Terimakasih kepada Bapak Drs.H. Suhardi, M.Si selaku Bidang Pasar beserta Bapak Bagas Ndaru Kartiko, SE selaku Seksi Pengembangan Pasar dan Bapak Syafruddin selaku Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL yang telah memberikan ruang dan waktu, serta informasinya kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Terimakasih kepada kedua Orang Tua yang saya sayangi Ayahku Tercinta “Mukhlis” dan Ibuku Tercinta “Hernawati” yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa selalu mendo’a kan, memberikan inspirasi, semangat, dukungan, support, serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Adikku Tercinta “Muhammad Rivaldi dan Muhamad Haikal” yang telah memberikan semangat, dukungan dan do’a-nya selama proses pengerjaan Skripsi penulis, sehingga dapat diselesaikan pada waktunya.
9. Terimakasih kepada Keluarga besarku “*Siman’s Family*” teruntuk “Mak Uteh (Alm), Ngah Tena, Mak Roha, Mak Mie, Tante Titin, Tante Naning, Tante Ira, Long Oden, Mok Epol, Pak Is, Pak Lan, Ucu Muslim, Kakaku Wulan Syafitri, Kakaku Nailul Jannah dan Abangku Azrul Asyikin” yang telah memberikan semangat, kebahagiaan, indahnya kekeluargaan serta

doa-doa dan harapan untuk winda selama proses pengerjaan Skripsi ini, sehingga bisa selesai tepat pada waktunya.

10. Terimakasih juga kepada Sahabatku, chingu, eonnie-ku, sekamarku, seperjuanganku “Miftahul Hayati”. Terimakasih telah menjadi sahabat-teman selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Terimakasih telah menolong saya. Terimakasih untuk segala waktu dan luangnya yang telah berikan kepada saya. Jadilah sahabat saya hingga tua nanti.
11. Terimakasih kepada Teman sehati-sefrekuensi “Dayang Nurjannah, Sari Octayuni, Emilia Sabrini dan Yuyun Marniati” serta teman-teman seperjuangan sekampus, se fakultas, sekelas IP.H terkhusus kepada “Ririn Wandes Octavia, Siska Eka Putri, Yendra Erison, dan Meidil Akhyar” yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
12. Terimakasih juga yang teramat dalam saya ucapkan kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang telah selalu memberikan kisah dan perjuangan kalian kepada saya “if you don’t work hard, there won’t be a good result” untuk meraih mimpi dan harapan setinggi-tingginya, “Borahae Bangtan Sonyeondan”.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga segala bentuk bantuan, ilmu motivasi, semua pihak hingga terselesaikan Skripsi ini dan menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada pembacanya.

Pekanbaru, 03 Februari 2021

Pekanbaru,

Windsari

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	14
2. Konsep Tugas dan Fungsi.....	18
3. Konsep Kebijakan.....	19
4. Konsep Evaluasi.....	22
5. Konsep Pasar dan Pasar Tradisional.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	37
D. Konsep Operasional.....	37
E. Operasional Variabel.....	40
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	41

B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan dan Key Informan Penelitian	42
D. Teknik Penentuan Informan	43
E. Jenis dan Sumber Data Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	44
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	45
I. Rencana Sistematika Laporan Skripsi	46
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Geografis.....	47
B. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru.....	49
C. Visi dan Misi	50
D. Struktur Keorganisasian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	51
E. Uraian Tugas dan Fungsi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	52
F. Kondisi Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru	63
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	65
1. Tingkat Pendidikan	65
2. Jenis Kelamin	66
3. Usia Responden.....	67
4. Agama	68
B. Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru.....	68
1. Efektivitas.....	71
2. Efisiensi.....	79
3. Kecukupan.....	81
4. Pemerataan	86

5. Responsivitas.....	91
6. Ketetapan.....	93
C. Hambatan Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru	97

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100

DAFTAR KEPUSTAKAAN	102
---------------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Nama Pasar dan Jumlah Pedagang Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	8
I.2 Data Jumlah Pedagang Pasar Teratai Higienis Madani Oleh Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	10
II.2 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Kota Pekanbaru	40
III.1 Informan dan Key Informan Penelitian.....	42
III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru	45
IV.1 Luas Kecamatan Kota Pekanbaru	48
IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan jenis Kelamin di Kecamatan Senapelan.....	50
V.1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
V.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
V.3 Identitas Responden Berdasarkan Umur	67
V.4 Identitas Responden Berdasarkan agama	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pasar teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru	37
IV.1 Struktur OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian di Lokasi Penelitian Mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Higienis Madani Kota Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Windasari
NPM : 157310004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi Penelitian : Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah ujian konferehensif ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan pernyataan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan dan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Februari 2021

Pelaku Pernyataan,



46
Windasari
Windasari

EVALUASI PENYELENGGARAAN PASAR TERATAI HIGIENIS

MADANI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

WINDASARI

Pasar higienis yang disediakan oleh pemerintah dinilai merugikan pedagang, masalahnya pemerintah merelokasi gedung pasar tersebut ke tempat yang sepi pembelinya. Tujuan Penelitian untuk mengevaluasi penyelenggaraan pasar teratai higienis madani dan untuk mengetahui hambatan dalam penyelenggaraan pasar teratai higienis madani kota pekanbaru. Metode Penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL dan Pedagang dengan jumlah informan 6 orang. Teknik Penentuan Informan Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, dan Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Pedagang dilakukan dengan menggunakan teknik *Sampling Snowball*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pasar yang dilakukan Dinas Pasar masih belum sempurna dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan Dinas Pasar sehingga pasar higienis belum mampu untuk bertahan dan bersaing. Kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengumpulan data, bahwa pasar higienis belum mampu bertahan dan bersaing, yang pada akhirnya pasar tersebut tidak beroperasi lagi disebabkan kurang tanggapnya pemerintah terhadap penyelenggaraan pasar tersebut. Saran dan Hambatan penyelenggaraan pasar higienis madani kota pekanbaru, yaitu : tidak ada dukungan pedagang terhadap penyelenggaraan pasar higienis, dapat dilihat kondisi pasar Higienis Madani Kota Pekanbaru saat ini sudah tidak beroperasi lagi dan sudah ditinggalkan oleh pedagang.

Kata kunci : Evaluasi, Penyelenggaraan, Pasar Higienis

EVALUATION OF MADANNI HYGIENIC TERATAI MARKET IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

WINDASARI

The Hygienic market provided by the government is considered to be detrimental to traders, the problem is that the government relocated the market building to a place where buyers were quiet. The research objective was to evaluate the implementation of the sanitary lotus market and to determine the obstacles in the implementation of sanitary lotus market in Pekanbaru City. the research method is a qualitative method. This research is located at the Departement of trade and industry Pknbaru City. in this study consisted of the head of the maret division, the market development and supervision section, the cleanliness, order and development section of street vendors and trades with 6 informants. The technique for determining the head of the market, the market development and supervision section, the cleanliness, order and development section of street vendors was carried out by using technique purposive sampling. Traders are carried out using the technique snowball sampling. The results of this study indicate that in the implementation of the market which is carried out by the market office is still not perfect properly and does not achieve the goals desired by the market office so that the hygienic market has not been able to survive and compete. This conclusion is in accordance with data collection techniques, that the hygienic market has not been able to survive and compete, which in the end the market ceases to operate due to the lack of responsiveness of the government to the implementation of the market. Suggestions and obstacles in the implementation of sanitary hygienic market in Pekanbaru City, namely : there is no support from traders for the implementation of the hygienic market, it can be seen that the current condition of the madani hygienic market in Pekanbaru City is no longer operating and has been abandoned by traders.

Keywords : Evaluation, Implementation, Hygienic Market

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI ini mempunyai tujuan yang sangat istimewa dan mulia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat pada alenia ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban abadi dan keadilan sosial.

Konsep tersebut sejalan dengan konsep desentralisasi yang mempunyai tujuan utama mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Demi mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera perlu adanya pembangunan di suatu daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang,
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman,
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

yaitu:

1. Tenaga kerja,
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
3. Pangan,
4. Pertanahan,
5. Lingkungan hidup,
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa,
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
9. Perhubungan,
10. Komunikasi dan informatika,
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah,
12. Penanaman modal,
13. Kepemudaan dan olah raga,
14. Statistik,
15. Persandian,
16. Kebudayaan,
17. Perpustakaan, dan
18. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat Pilihan

meliputi :

1. Kelautan dan perikanan,
2. Pariwisata,
3. Pertanian,
4. Kehutanan,
5. Energi dan sumber daya mineral,
6. Perdagangan,
7. Perindustrian, dan
8. Transmigrasi.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau yang berfungsi sebagai pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan, Pusat Perdagangan, Industri, dan Jasa. Pekanbaru saat ini memiliki perkembangan dan

pertumbuhan yang cukup pesat, terlihat adanya pusat-pusat perdagangan modern dan tradisional, selain di pusat kota juga tersebar kecamatan-kecamatan dalam Kota Pekanbaru. Akibat pertumbuhan penduduk Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dituntut untuk menangani berbagai masalah yang muncul akibat penduduk, seperti ketertiban umum, kebersihan dan keindahan terutama pusat-pusat perdagangan seperti pasar, karena begitu pentingnya pasar bagi pemenuhan kebutuhan penduduk kota maka pengelolaan pasar dianggap penting sebagai bagian pelayanan pemerintah pada masyarakat.

Sebagaimana diketahui pasar merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sekaligus menjadi wadah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Selain itu Pasar dimanfaatkan oleh pedagang sebagai tempat mencari nafkah yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah swasta. Pasar juga perlu untuk dikelola, dimana pasar-pasar yang kurang bagus perlu diperbaiki supaya keberadaan pasar menjadi tertata dengan rapi, dan juga sarana pasar yang disediakan oleh pemerintah kota dikelola langsung oleh pemerintah kota Pekanbaru yang memberi wewenang dinas pasar yang tugasnya dalam melakukan penertiban yang diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna pasar.

Berdasarkan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengelola pasar tersebut maka dari itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai lembaga yang mengelola pasar mempunyai peran penting terhadap hal

tersebut. Bidang Pasar sebagai salah satu bidang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengemban tugas membantu Walikota Pekanbaru dalam melakukan otonomi daerah dibidang pengelolaan pasar. Bidang Pasar merupakan bagian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang sebelumnya bernama Dinas Pasar. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat,
3. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian
4. Bidang Perdagangan,
5. Bidang Pasar,
6. Bidang Perindustrian,
7. Unit Pelaksana Teknis,
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Salah satu bagian dari struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah UPTD. Dalam pembentukan UPTD ini, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Tujuan dibentuknya UPTD untuk membantu Kepala Dinas Pasar dalam penyelenggaraan kewenangan teknis operasional di Bidang Pasar dimana dalam pengertiannya yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di kewenangannya di masing-masing pasar yang ada di kota Pekanbaru. Berikut adalah uraian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu :

- a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas pemungutan Retribusi Pengelolaan Pasar dalam lingkungan Pasar yang berada di

bawah wewenangnya, dengan memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pemungutan secara tepat dan efektif kepada para juru tagih sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

- b. Memberikan rencana, usulan, masukan dan sasaran kepada Kepala Dinas Pasar menyangkut perbaikan dan pengembangan pengelolaan pasar yang berada dibawah wewenangnya,
- c. Bertanggungjawab atas kelancaran pemasukan keuangan daerah dari sektor retribusi pengelolaan pasar dalam lingkungan pasar yang menjadi wewenangnya.
- d. Bertanggungjawab atas ketertiban, kemandan, kebersihan dan keindahan pasar yang berada dibawah wewenangnya.
- e. Membuat laporan tentang perubahan kondisi pasar meliputi perubahan data pedagang, pemilik dan penyewa dilingkungan pasar yang menjadi kewenangannya.
- f. Membuat laporan berkala tentang pemasukan keuangan daerah dari sektor pasar yang berada dibawah wewenang.
- g. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Berikut adalah uraian fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam

Pasal 6 yaitu :

- a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja,
- b. Penyusunan rencana,
- c. Penataan pasar,
- d. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan,
- e. Penyusunan laporan,
- f. Pengoordinasian dengan SKPD terkait,
- g. Pelaksanaan evaluasi tugas,
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan pasar Teratai Higienis Madani, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru berpedoman kepada Kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat,

dimana dalam kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pasar sehat adalah kondisi pasar yang bersih, nyaman, aman dan sehat melalui kerjasama seluruh stakeholder terkait dalam menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Pedoman penyelenggaraan pasar sehat ini memberikan panduan sebagai kebijakan untuk penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru mengenai langkah-langkah penyelenggaraan, kebijakan dan strategi, tujuan, manfaat dan sasaran, persyaratan kesehatan lingkungan pasar, dan pengorganisasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan penyelenggaraan pasar higienis juga di dukung dengan adanya Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 213 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Teratai Higienis Madani Kecamatan Senapelan, di dalam keputusan Walikota Pekanbaru disebutkan pengelolaan pasar rakyat teratai higienis madani dilaksanakan oleh dinas pasar kota Pekanbaru dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Pasar Teratai Higienis Madani adalah salah satu sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta dimanfaatkan oleh para pedagang sebagai tempat mencari nafkah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pasar Teratai Higienis dulunya dibangun di SDN 019 Pekanbaru dan sudah diresmikan penggunaannya sejak september 2016 lalu. Untuk sarana pasar yang disediakan oleh pemerintah kota dikelola langsung oleh pemerintah kota Pekanbaru yang memberi wewenang kepada Bidang Pasar sebagai pengelola pasar yang akan melaksanakan

pengawasan tersebut yang diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna pasar higienis tersebut.

Pasar Teratai Higienis dibangun di jalan Teratai Kecamatan Senapelan untuk merelokasikan pedagang kaki lima yang berjualan disekitar jalan Teratai agar tidak ada lagi pedagang-pedagang yang berjualan di luar pasar, karena kondisi disekitar banyak dipenuhi oleh pedagang yang berjualan di pinggir jalan tersebut, yang mengakibatkan lingkungan sekitar jalan Teratai tidak bersih dan kumuh, sehingga diciptakanlah pasar Teratai Higienis Madani dengan standarisasi yang telah ditetapkan, adapun standarisasi pasar Teratai Higienis Madani berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat yaitu :

- a. Lokasi, tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti : bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, dsb.
- b. Bangunan, pembagian area sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya seperti : basah, kering, penjualan unggas hidup, pemotongan unggas.
- c. Sanitasi, terdapat air bersih, toilet, pengelolaan sampah, drainase, tempat cuci tangan, binatang penular penyakit, kualitas makanan dan bahan pangan, dan desinfeksi pasar.
- d. Perilaku hidup bersih dan sehat.
- e. Keamanan, tersedia pos keamanan dan peralatannya.
- f. Fasilitas lain, seperti : tempat sarana ibadah, tempat penjualan unggas hidup, dan pos pelayanan kesehatan.

Pasar Teratai Higienis Madani berbeda dengan pasar tradisional lainnya, pasar Higienis ini menciptakan pasar yang sehat, bersih, aman dan nyaman bagi pedagang dengan fasilitas yang lebih bagus yang terdiri dari tempat berjualan yang berkeramik, memiliki atap penutup dan tertata rapi, dan sangat berbeda dengan pedagang yang berjualan di badan jalan yang tidak bersih, kumuh, tidak tertata rapi dan menghasilkan kepadatan di badan jalan tersebut.

Pasar di Kota Pekanbaru yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini terdiri dari dua macam yaitu pasar yang dikelola oleh pemerintah dan pasar kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga. Dimana pasar yang dikelola pemerintah dan pihak ketiga tersebut adalah pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu pasar yang dikelola oleh pemerintah adalah Pasar Teratai Higienis Madani jalan Teratai Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Adapun jumlah pasar tradisional di Kota Pekanbaru yang dikelola oleh pemerintah :

Tabel I.1 : Nama Pasar dan Jumlah Pedagang yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar	Alamat	Kios	Los	Pkl
1	Pasar Rumbai	Jalan Sekolah, Kecamatan Rumbai Pesisir	210	245	60
2	Pasar Lima Puluh	Jalan Sultan Syarif Kasim, Kecamatan Lima Puluh	112	161	-
3	Pasar Labuh Baru	Jalan Durian, Kecamatan Payung Sekaki	230	237	25
4	Pasar Agus Salim/ Pasar Sukaramai	Kecamatan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota	77	-	435
5	Pasar Simpang Baru	Jalan HR. Soebrantas, Kecamatan Tampan	64	32	130
6	Pasar Cik Puan	Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Sukajadi	451	237	65
7	Pasar Teratai Higienis Madani	Jalan Teratai, Kecamatan Senapelan	10	140	-
8	Pasar Tengku Kasim	Jalan Tengku Kasim Perkasa, Kecamatan Rumbai	41	196	-

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2019

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat kita lihat dari Delapan (8) pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah salah satunya Pasar Teratai Higienis, dari tahun 2017 hingga saat ini mulai tidak berjalan dan tidak berpenghuni lagi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pedagang yang meninggalkan kios, los tersebut dan pedagang lebih memilih berjualan di badan jalan, trotoar, maupun

di depan ruko. Para pedagang lebih senang berjualan di luar karena barang dagangan mereka lebih laku apabila dibandingkan dengan berjualan di dalam pasar tersebut.

Menurut penulis memilih lokasi penelitian di Pasar Teratai Higienis Madani karena ternyata pasar tersebut belum mampu untuk bertahan dan bersaing, dimulai pada bulan November penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis mulai dipenuhi oleh pedagang dan aktivitas jual beli meningkat akan tetapi seiring berjalannya waktu para pedagang sedikit demi sedikit mulai kehilangan pembeli dan dengan banyaknya pedagang yang meninggalkan los, kiosnya sehingga masyarakat atau pembeli kurang berminat untuk memasuki lokasi pasar tersebut. Adanya kelemahan dalam tata kelola Pasar Teratai Higienis yang menyebabkan para pedagang kembali berjalan di pinggir jalan. Setelah satu bulan berjalan dan dimana saat akhir bulan November, pasar tersebut sudah kosong dan tidak ada aktifitas jual beli lagi.

Sebelum Pasar Teratai Higienis dibangun, pemerintah sudah membangun Pasar Senapelan yang dulunya bernama Pasar Kodim menjadi pasar tradisional modern yang telah berdiri selama bertahun-tahun sampai saat ini. Namun pada kenyataannya pasar tersebut belum memberikan kontribusi yang baik bagi Pendapatan Asli Daerah. Adapun data jumlah los, kios pedagang yang ada di Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru yaitu :

Tabel I.2: Data Jumlah Pedagang Pasar Teratai Higienis Madani Oleh Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

No.	Keterangan	Los	Kios	Jumlah Keseluruhan
1.	Jumlah Petak/Orang yang Tersedia	140	10	150
2.	Jumlah Petak/Orang yang Aktif atau terdaftar mengisi Los dan Kios	20	4	24
3.	Jumlah Petak/Orang yang Tidak Aktif atau tidak terdaftar mengisi Los dan kios	120	6	126

Sumber : Bidang Pasar Kota Pekanbaru, 2019

Beberapa permasalahan yang penulis dapatkan dilapangan diantaranya :

Pertama, pada tabel diatas dapat kita ketahui Daftar Potensi Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru membuat anggaran pada UPTD Pasar Higienis Madani bahwa terdapat Jumlah Petak/Orang yang tersedia 140 Los dan 10 Kios di Pasar Higienis Madani Kota Pekanbaru. Pedagang yang mendaftar mengisi Los berjumlah 20 pedagang dan pedagang yang mengisi Kios berjumlah 4 Pedagang. Seiring berjalannya waktu Pasar Higienis sudah mulai ditinggalkan pedagang saat satu bulan berjalan . Dimana dari data diatas dapat dilihat hanya 24 Petak/Orang yang di isi oleh pedagang saat satu bulan awal bulan November, dan setelah memasuki akhir tahun yaitu bulan Desember sudah tidak ada lagi pedagang yang berjualan di kawasan Pasar Higienis tersebut.

Kedua, hasil dari pengamatan penulis beberapa pedagang mengatakan keluhannya saat menempati pasar higienis tersebut bahwa modal yang mereka keluaran setiap hari besar, sedangkan jual beli tak setimpal, kalau kondisi tersebut terus terjadi maka kedepanya mereka tidak bisa berjualan lagi. Sementara itu

pedagang lainnya menyebutkan, penertiban yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dinilai merugikan pedagang, masalahnya pemerintah kota merelokasi pedagang ke tempat yang sepi pembelinya. Sampai saat ini lokasi pasar higienis yang disediakan pemerintah untuk pedagang kosong, baik los ataupun kios di lokasi hanya terlihat orang-orang yang hanya sekedar duduk dan tidak ada aktivitas jual beli lagi.

Ketiga, dari hasil pengamatan penulis bahwa masih terlihat fasilitas yang kurang memadai seperti bangunan yang tidak terawat, toilet umum yang disediakan sudah tidak layak digunakan, mushola tidak terawat, keberadaan lahan parkir yang sangat minim karena sebagian digunakan untuk lapak pedagang.

Mengacu pada uraian yang telah dijelaskan maka di temui beberapa fenomena-fenomena dilapangan diantaranya seperti :

1. Kondisi Pasar yang tidak strategis, sehingga para pedagang tidak nyaman berjualan didalam gedung tersebut, hal ini memberikan dampak kerugian kepada pedagang.
2. Masih banyak pedagang yang tidak mau menempati kios dan los yang sudah disediakan, hal ini terlihat para pedagang kembali berjualan di pinggir badan jalan lantaran kondisi pasar higienis tidak Strategis.
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh bagian Bidang Pasar untuk para pedagang yang akan menempati los dan kios, hal ini terlihat bahwasannya para pedagang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pengelola Bidang Pasar.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis mencoba membuat perumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru?
2. Kendala Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengevaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu dan menambah bahan baca bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru.

- b. Kegunaan Akademis, bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi peneliti lain dalam kasus yang sama.
- c. Kegunaan Praktis, bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam setiap perumusannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

a. Konsep Pemerintah

Secara etimologis kata Pemerintahan berasal dari kata “Pemerintah”, kata pemerintah sendiri berasal dari kata “Perintah” yang berarti kata menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan, namun tinjauan asal kata “Pemerintahan” sebenarnya berasal dari Bahasa Inggris “*government*” yang diterjemahkan sebagai “Pemerintah” dan “Pemerintahan”. Namun ada juga yang berpendapat bahwa *government* tidak selalu memiliki makna Pemerintahan, karena Samuel Edward Finer mengartikan kata *government* sebagai *Public Servent (pelayanan-pelayanan)* menurut Hasan (2005;1).

Menurut Apter Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum serta memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan menurut Syafiie (2003;23).

Selanjutnya menurut Wilson, Pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang

memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan (dalam Syafiie, 2017;23).

Menurut Kansil (2002;17), dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian pemerintah, yakni pemerintah sebagai alat Negara yang melaksanakan tugas dan pemerintah sebagai menjalankan fungsi dari Pemerintah.

Sedangkan menurut W.S. Sayre, Pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya (dalam Syafiie, 2017;21-22). Selanjutnya menurut Sumaryadi (2010;16) Pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu.

Selanjutnya menurut Finer (dalam Sumaryadi 2010;18), mengklasifikasi pemerintah kedalam empat pengertian:

1. Pemerintah mengacu pada proses Pemerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang.
2. Pemerintah dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan.
3. Pemerintah berarti orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
4. Pemerintah juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat , yakni struktur dan pengelolaan Dinas Pemerintah dan hubungan antara yang memrintah dan diperintah.

b. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiie (2003;20), Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah, yang paling sedikit kata “Perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua

pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Dalam melaksanakan pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologis menurut Syafiie (2007;4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatutan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut R. Mac Iver, Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, dan bagaimana manusia itu bisa diperintah (dalam Syafiie, 2017;22).

Menurut CF. Strong, Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu kementerian yang diberi tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan Negara (dalam Hasan, 2005;2).

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (2003;5), Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, konsumen, yang tidak berdaya dan sebagainya.

c. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Pendapat yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan, hanyalah merupakan cabang dari suatu disiplin ilmu, serta anggapan yang menumpangtindihkan ilmu administrasi Negara, ilmu hukum tata Negara, ilmu politik, ilmu Negara sendiri dengan ilmu pemerintahan, pada gilirannya juga akan tergeser oleh perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri. (dalam Syafiie, 2017;38).

Menurut D.G.A Van Poelje, Ilmu Pemerintahan itu mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya (dalam Syafiie, 2017;21).

Selanjutnya menurut U. Rosenthal, Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum (dalam Syafiie, 2017;21).

Selanjutnya menurut H.A. Brasz, Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya (dalam Syafiie, 2017;21).

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007;32), Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan antara hubungan dinas dengan masyarakat yang berkepentingan diwakili oleh dinas itu.

- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebutuhan yang menyelidiki sistematis problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam maupun keluar.
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintah dan yang diperintah dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan pihak lain dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat dan daya tindak yang efektif dalam pemerintah.
- d. Ilmu yang ditetapkan dan mengadakan penelitian dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

2. Konsep Tugas dan Fungsi

Menurut Miftah Thoha (2011;76), Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Menurut Winardi (2003;26), Tugas pokok dan fungsi merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Menurut Winardi (2003;34), tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

3. Konsep Kebijakan

Menurut Budiardjo, 1972, secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan “*wisdom*” yang berarti “cinta kebenaran”. Kebijakan diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak dalam bahasa politik diistilahkan sebagai *statemen of intens* atau perumusan keinginan (dalam Farid Ali – Andi Syamsu Alam, 2012;7).

Menurut Nugroho (2004;58) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Young dan Quinn, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan financial untuk melakukannya. Kebijakan adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak (dalam Suharto, 2005;44).

Menurut Dunn (2003;109), Kebijakan Publik adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan didalam bidang-bidang isu sejak pertanahan, energi dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan.

Menurut Robert Eyestone, kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (dalam Agustino, 2006;6). Selanjutnya menurut Max Weber, menyatakan bahwa birokrasi merupakan suatu organisasi formal bersifat hierarki, yang ditetapkan oleh aturan-aturan legal rasional untuk mengoordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepenringan pelaksanaan tugas administrasi agar mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien (dalam Pandji Santosa, 2017;118).

Menurut Kansil dan Cristine (2008;190), Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Friedrich (dalam Wahab, 2004;3), Kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Partowidagdo (dalam Anwar, 2011;42) model kebijakan adalah rekontruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan,, menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat

alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2000;105) perumusan kebijakan merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Menurut Carl J. Frederich, 1963 (dalam Wicaksono, 2006;63) kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa *“public pilicies are those policies deveped by governmental bodies and officials”*

dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa:

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan “model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi public polic, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Wahab 2004;3).

4. Konsep Evaluasi

Menurut Sudjana (2006;7), Evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program program sesuai dengan rencana, dan/atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi para

pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan.

Menurut Jones (1994;357), Evaluasi adalah suatu aktifitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Selanjutnya Weiss (dalam Jones, 1994;355) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kata kriteria yang meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan kriteria. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang.

Fungsi evaluasi yaitu: pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan tepat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi (Dunn, 2003;609-610).

Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya (Dunn, 2003;608-609) yaitu:

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi fakta–nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan *evaluative*. Berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Menurut Mustopadidjaja (2003;45), Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai. Selanjutnya menurut Dimiyati & Mudjiono (2006;19) evaluasi dipertegas lagi sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Menurut Nurcholis (2005;169), Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Sedangkan kriteria/indikator evaluasi menurut Dunn (2003;610) adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat distribusikan dengan merata kepada kelompok berbeda.
5. Responsivitas, adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, profesi, dan nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketetapan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Sedangkan menurut Ndraha (2011;201), Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dengan analisis hasilnya. Terdapat tiga model evaluasi tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Model *Before - After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (*treadment*). Tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
2. Model *Das Sollen – Das Sein*, yaitu perbandingan dengan yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das sollen*.
3. Model *Kelompok Kontrol – Kelompok Tes*, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah *kelompok control*.

Menurut anderson (dalam Hafis, 2015;86) mengatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Selanjutnya menurut Arifin (2014;5), Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi.

Lester dan Stewart (dalam Hafis, 2015;87), Evaluasi Kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda: pertama, dengan menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Kedua, dengan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Vendung (dalam Wirawan, 2011;16), Evaluasi dapat diartikan sebagai proses mekanisme untuk mensistematikan, dan meningkatkan aktivitas

pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dapat bertindak serta tanggung jawab, kreatif dan seefisien mungkin.

Menurut Nurcholis (2007;274), Evaluasi adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, output, dan outcomes dari kebijakan pemerintah. Selanjutnya menurut Subarsono (2009;119), Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

Menurut Siagian (dalam Winarno, 2010;233) mengemukakan bahwa evaluasi (penilaian) di definisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto & Jabar (2010;56) evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Selanjutnya menurut Stutflebeam (dalam Arikunto & Jabar, 2010;57), Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam menentukan *alternative* keputusan.

Menurut Kamus Besar Indonesia, Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahab (2004;102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil

(*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Sosial masukan;
2. Sosial keluaran; dan
3. Sosial hasil.

a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004;3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan
Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan
Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan
Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakan letak pada objek yang dinilai dengan dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

b. Proses Evaluasi

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi menurut Dunn (2008;8), antara lain:

1. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada ditangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

c. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan menurut Wahab (2004;51), yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (Dunn, 2008;8), yaitu:

1. *Measurement*, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. *Test*, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. *Assessment*, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

5. Konsep Pasar dan Pasar Tradisional

Menurut William (dalam Mursid, 2015;25) mengemukakan pengertian yang lain tentang pasar ini, yakni: Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar:

- a. Orang dengan segala keinginannya
- b. Daya beli mereka
- c. Tingkah laku dalam pembelian mereka

Menurut Kotler (2002;73), Pasar adalah suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa. Selanjutnya

menurut Simamora (2001;6) ada beberapa ketentuan untuk menyatakan bahwa sekumpulan orang adalah pasar:

1. Memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk tertentu.
2. Memiliki kemampuan untuk membeli produk tersebut.
3. Memiliki kemauan untuk membelanjakan uangnya.
4. Memiliki kesempatan membeli produk tertentu.

Menurut Mursid (2014;25), Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau pasar adalah daerah atau tempat yang ada didalamnya terdapat kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Selanjutnya menurut William J. Stanton (dalam Mursid, 2014;25), Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puasa, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar yaitu:

- a. Orang dengan segala keinginan
- b. Daya beli mereka
- c. Tingkah laku dalam pembeli mereka

Menurut Mursid (2014;27), Pasar adalah sekumpulan orang atau keluarga atau instansi yang mempunyai kebutuhan dan daya beli. Pasar pada hakikatnya dapat dibagikan menjadi empat golongan yaitu sebagai berikut:

- a. *Consumer Market* (Pasar Konsumsi)
- b. *Industrial/Producer Market* (Pasar Industrial)
- c. *Government Market*

Menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>) dalam ilmu ekonomi, pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Pertukaran barang

atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.

a. Klarifikasi Pasar

1. Pasar Tradisional, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan, pakaian, barang elektronik, jajanan pasar, jasa dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan pada umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar tersebut.
2. Pasar Modern, secara umum pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, seperti (*hypermart, supermarket, minimarket, maupun swalayan*). namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang berupa barcode, dan berada dalam bangunan dan pelayanannya pun dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging bahwa sebagian besar bahan makanan yang dijual dapat bertahan lebih lama.

b. Pasar Menurut Klarifikasinya

1. Pasar Menurut Keleluasan Distribusi:

- a. Pasar Daerah, merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 daerah produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa pasar daerah melayani permintaan serta penawaran hanya dalam 1 daerah.
 - b. Pasar Lokal, merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 kota tempat produk itu dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan serta penawaran hanya dalam 1 kota.
 - c. Pasar Nasional, merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 negara tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan serta penjualan dari dalam negeri.
 - d. Pasar Internasional, merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Dapat juga dikatakan luas jangkauan dari pasar tersebut adalah di seluruh dunia.
2. Pasar Menurut Fisiknya:
 - a. Pasar Konkret atau pasar nyata, merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi secara langsung dan juga dapat dilihat dengan kasat mata. Contohnya : bursa komoditi, bursa saham, dan sebagainya.
 - b. Pasar Abstrak atau pasar tidak nyata, merupakan pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, biasanya hanya dapat melalui telepon, internet, brosur maupun lainnya.
 3. Pasar Menurut Barang yang Diperjual-belikan:
 - a. Pasar konsumsi, merupakan pasar yang menjual barang-barang yang langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Contoh: alat-alat rumah tangga, beras, dan sebagainya.
 - b. Pasar Produksi, merupakan pasar yang memperjual-belikan faktor-faktor produksi, seperti pasar uang, pasar tenaga kerja, maupun pasar mesin-mesin lainnya.
 4. Pasar Menurut Waktu Penyelenggara:
 - a. Pasar Harian, merupakan pasar yang kegiatan jual-belinya dilakukan setiap hari yang terdapat didesa maupun kota.

- b. Pasar Mingguan, merupakan pasar yang kegiatan jual-belinya hanya satu kali dalam seminggu.
 - c. Pasar Bulanan, merupakan pasar yang kegiatan jual-belinya dilakukan setiap sebulan sekali.
 - d. Pasar Tahunan, merupakan pasar yang kegiatan jual-belinya dilakukan setiap setahun sekali.
 - e. Pasar Temporer, merupakan pasar yang diselenggarakan organisasi pada acara tertentu saja.
5. Pasar Menurut Organisasinya:
- a. Pasar Persaingan Sempurna, merupakan keadaan dimana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. barang yang diperjual-belikan homogen (sejenis), selain itu penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga, karena harga ditentukan dalam kekuatan pasar. Harga yang telah terbentuk merupakan hasil dari mekanisme pasar berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran.
 - b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna, bersifat heterogen, dalam hal ini penjual dan pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga, jenis, dan kualitas barang yang akan di perjual-belikan.
 - c. Pasar Monopoli dan Monopsoni, merupakan pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli untuk suatu jenis barang dan jasa karena yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi dan bersifat menduniawi.
 - d. Pasar Persaingan Monopolistis, penjual bisa melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing. Pasar ini dapat bebas menentukan pilihannya dalam berbelanja, karena ada unsur persaingan dan monopoli.
 - e. Pasar Oligopoli, merupakan jenis pasar yang hanya ada beberapa penjual, sehingga pengaruh penjual sangat kecil, dan tidak ada penjual yang berkuasa segala-galanya (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>).

Menurut Wicaksono (2011), Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los,

dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern.

Menurut Masitoh (2013), Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. Di pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun pengunjung juga bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan permasalahan pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyiratkan bahwa sebagian besar variabel pembinaan dapat mempengaruhi variabel-variabel lainnya. Untuk

memudahkan pemahaman terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada berikut ini :

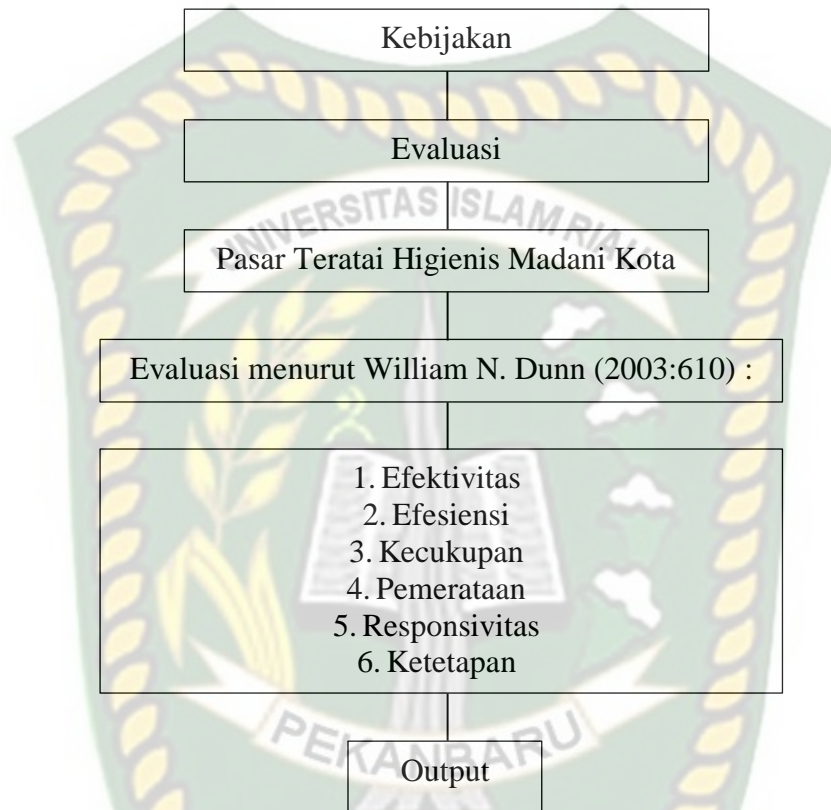
Tri Angga Saputra (2017) dengan judul “Analisis Tugas Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Menata Pasar Rakyat Sri Gading Air Molek di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Tugas Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Menata Pasar Rakyat Sri Gading Air Molek di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menata Pasar Rakyat Sri Gading Air Molek di kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini adalah survey. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu masih belum maksimalnya tugas Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu, seperti ditemukan pedagang yang tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah seperti kios dan los. Hambatan mengenai Tugas Bidang Pengelolaan Pasar dalam Menata Pasar Rakyat Sri Gading Air Molek karena belum ditetapkannya standar pengawasan sehingga dapat membuat tugas atau kegiatan yang akan dilaksanakan tidak diketahui tingkat pencapaiannya, dimana standar pengawasan merupakan acuan untuk segala tindakan yang akan dilakukan dalam pengawasan supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Dan kurangnya keterlibatan pemerintah terkait mengenai penetapan standar pengawasan pasar, dibuktikan dengan belum ditetapkannya dampak buruk

terhadap semua aspek proses kegiatan pengawasan di pasar, menjaga keamanan serta ketertiban pasar dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Ririn Wandes Octavia (2020) dengan judul “Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pasar tradisional sorek satu oleh dinas di kecamatan pangkalan kuras dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengelola pasar tradisional sorek satu dinas di kecamatan pangkalan kuras. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe naratif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu kurangnya pengawasan dan ketegasan dari petugas bagian pengelolaan pasar disperindag kabupaten pelalawan dalam hal pemungutan retribusi pasar di pasar sorek satu terhadap kios-kios dan los. Hasil observasi penelitian dilapangan di dapatkan bahwa disperindag tidak ada melakukan pengawasan begitu juga sebaliknya petugas pengelola pasar tidak pernah turun langsung untuk melakukan pengawasan terhadap pedagang. Hambatan peran dinas perindustrian perdagangan yaitu minimnya dan tidak meratanya pengawasan yang dilakukan oleh pengelolaan pasar, kurangnya tanggung jawab dari dinas perindustrian perdagangan dalam pengelolaan pasar tradisional sorek satu sehingga sangat minimnya peran dalam pengelolaan pasar tersebut.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru



Sumber : Teori William N. Dunn & Modifikasi Penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah hubungan masing-masing yang menunjuk pada aplikasi skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara spesifik evaluasi berkenaan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat kebijakan.

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Perdagangan dan Perindustrian.
3. Pemerintah adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang merupakan pendelegasian dari pemerintah didalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat.
4. Pemerintahan adalah sebagai badan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati seluruh ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara secara perseorangan maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan maupun masyarakat dalam pembinaan pasar.
5. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
6. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
7. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.
8. Pasar Teratai Higienis Madani merupakan salah satu sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan perbelanjaan yang diperlukan

oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta dimanfaatkan oleh para pedagang sebagai tempat berusaha yang disediakan oleh pemerintah daerah.

9. Efektivitas adalah hasil yang diinginkan telah tercapai, dimana setiap kebijakan yang dibuat mestilah efektif, sehingga yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai serta objek dari kebijakan tersebut juga sesuai dengan yang diinginkan.
10. Pengarahan adalah fase kerja manajemen, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian berusaha memotivasi, membina, menangani konflik, dan kerjasama.
11. Kecukupan adalah kebijakan dalam pelaksanaan program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dan pencapaian tujuan.
12. Pemerataan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara adil dan bijaksana untuk memutuskan kebijakan selanjutnya.
13. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktifitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
14. Ketetapan merupakan suatu usaha untuk menempatkan sesuatu pada posisinya sesuai dengan porsi dan kecakapannya. Oleh karena itu ketetapan memerlukan penilaian dan kejelian yang seksama untuk menempatkan sesuatu hal tersebut pada tempatnya, sehingga

pelaksanaan atau pencapaian tujuannya dapat terlaksana dengan baik dan benar.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higenis Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi adalah penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>asement</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah dibuat jelas dan diatasi (William N. Dunn, 2003:608)	Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higenis Madani Kota Pekanbaru	1. Efektivitas	a. Adanya target dalam penataan pasar. b. Adanya penempatan pedagang.
		2. Efisiensi	a. Adanya pengarahannya terhadap pedagang.
		3. Kecukupan	a. Mendisiplinkan pegawai. b. Mendisiplinkan para pelaku usaha.
		4. Pemerataan	a. Penetapan sanksi terhadap pedagang. b. Standar yang ditetapkan.
		5. Responsivitas	a. Melaksanakan pembinaan pedagang.
		6. Ketetapan	a. Melakukan pengawasan secara langsung

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan merupakan data yang bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan bukan dalam bentuk angka. Menurut pendapat Denzin dan Lincoln (dalam Lexy J. Moleong, 2014;5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

B. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru selaku yang diberikan kewenangan karena dinas ini melaksanakan kewenangannya. Alasan penulis melakukan penelitian ini disebabkan karena lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni meneliti tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan penelitian ini akan menambah wawasan peneliti sendiri dan juga masyarakat serta pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Untuk menemukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian.

1. Informan

Menurut Arikunto (2006:145), Informan adalah orang yang memberi informasi, dengan pengertian ini dapat dikatakan sama dengan responden, apabila keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti.

2. Key Informan

Menurut (Suyanto:172), Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini yang menjadi Key Informan adalah Kepala Bidang Pasar, sedangkan yang menjadi Informan penelitiannya adalah Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL dan Pedagang, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.1 : Informan dan Key Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Pasar	1
2.	Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan	1
3.	Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL	1
4.	Pedagang	3

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

D. Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan Informan yang dipergunakan untuk Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL dan Pedagang mempergunakan *Teknik Purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:96) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sampling snowball merupakan metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari suatu responden ke responden lainnya. Pertama-tama peneliti memilih satu atau dua orang untuk diwawancarai, tetapi setelah pengambilan sampel tersebut, peneliti belum merasa cukup puas terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari sampel baru yang dianggap lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh satu atau dua orang sebelumnya, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak.

E. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Apabila dilihat dari sudut jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat dibedakan antara lain :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan teknik wawancara. Data primer ini berupa sampel tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari undang-undang literatur dan pendapat para ahli maupun laporan-laporan yang berhubungan

tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi

yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.

2. Wawancara

yaitu teknik pengumpulan data yang utama, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. tujuan penelitian ini dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang akan diwawancarai.

3. Dokumentasi

yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri bukti gambar seperti jumlah Los dan Kios atau Lapak Kaki Lima.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian melalui alat penelitian berupa gambaran dari temuan-temuan di lapangan wawancara kalau dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan dan diolah secara kualitatif atau pengelompokkan

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa sub-sub bagian yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
- BAB II : Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikir yang meliputi Studi Kepustakaan, Kerangka Pikir, Konsep Operasional, Operasional Variabel, dan Teknik Pengukuran.
- BAB III : Metode Penelitian yang meliputi Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.
- BAB IV : Deskripsi Laporan Penelitian membahas mengenai deskripsi dan gambaran umum tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian.
- BAB V : Hasil Penelitian ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru.
- BAB VI : Kesimpulan dan hasil penelitian yang penulis temukan dan berikan saran atas temuan tersebut.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ – $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ – $45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 -50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antar 5 – 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $62,96 \text{ km}^2$ menjadi $446,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuk Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Berikut dijelaskan luas wilayah perkecamatan di Kota Pekanbaru:

Tabel IV.1 : Luas Kecamatan Kota Pekanbaru

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase Luas
Tampan	59,81	9,46
Payung Sesaki	43,24	6,84
Marpoyan Damai	29,74	4,70
Tenayan Raya	171,27	27,09
Lima Puluh	4,04	0,64
Sail	3,26	0,52
Pekanbaru Kota	2,26	0,36
Sukajadi	3,76	0,59
Senapelan	6,65	1,05
Rumbai	128,85	20,38
Rumbai Pesisir	157,33	24,88
Bukit Raya	22,05	3,49
Pekanbaru	632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa Pekanbaru mempunyai luas wilayah 632,26 km². Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi kecamatan terluas dengan luas wilayah 157,33 km² dengan persentase luas 24,88% dan kecamatan terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayahnya hanya mencapai 2,26 km² dengan persentase luas 0,36%.

Sedangkan Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

B. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan kota bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menginap di Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin.

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada saat ini berjumlah 1.001.864 jiwa, dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 491.952 jiwa dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 486.017 jiwa. kecamatan Senapelan memiliki jumlah penduduk mencapai 36.599 jiwa pada tahun 2019. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen dari tahun 2018. Kepadatan penduduknya mencapai 5.504 jiwa/km², dengan kelurahan terdapat adalah kelurahan Kampung Baru yaitu 7.786 jiwa/km².

Berikut merupakan distribusi data mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Senapelan

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Padang Bulan	4.957	5.173	10.130
2.	Padang Terubuk	4.039	3.982	8.021
3.	Sago	1.120	946	2.066
4.	Kampung Dalam	1.445	1.437	2.882
5.	Kampung Bandar	1.994	2.241	4.235
6.	Kampung Baru	4.615	4.650	9.265
Jumlah		18.170	18.429	36.599

Sumber : Badan Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru adalah suku melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan.

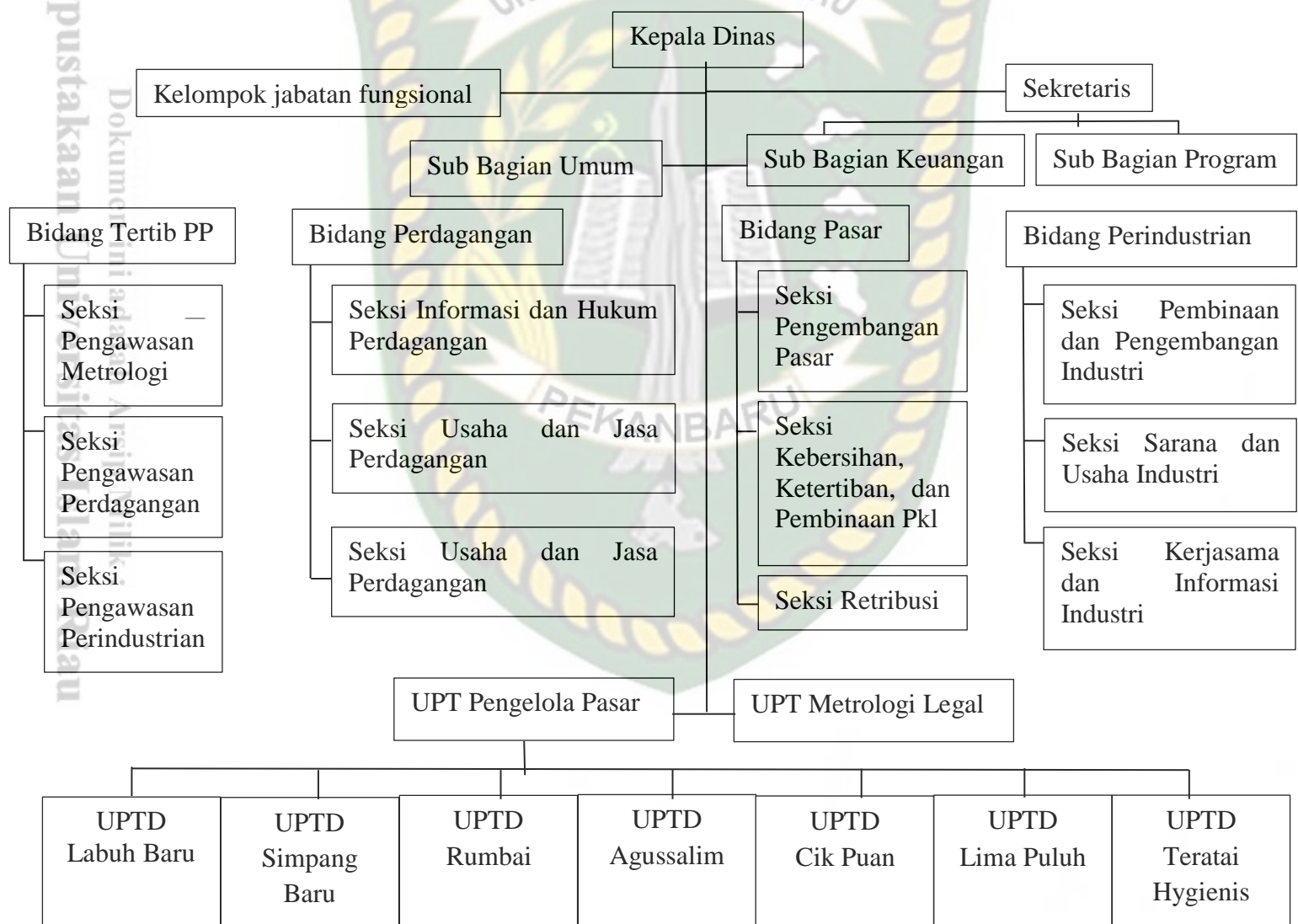
2. Misi

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata
2. Menumbuhkan kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industri dan perdagangan

5. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, industri, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar/jasa serta perlindungan konsumen.

D. Struktur Keorganisasian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Gambar IV.1 : Struktur OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian



E. Uraian Tugas dan Fungsi Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Dinas Perdagangan dan Perindustrian ialah salah satu instansi teknis yang membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di dibidang pengembangan pasar dan pengawasan.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan di bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya. Adapun tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- d. Perumusan kebijakan, peyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam Lingkup tuganya
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pegoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Secretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran , pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- i. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengasirpan Penilaian Prestasi Kerja ASN di lingkungan dinas.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan program kerja sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkaoan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- c. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- e. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- f. Pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
- g. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Penyimpanan dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Rencana Strategis (Renstrat), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Laporan Evaluasi Kinerja.
- b. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. Pelaksanaan fasilitas barang dan jasa.
- f. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian

Bidang tertib perdagangan dan perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan

dan perindustrian. Adapun Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrogian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri.
- b. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil.
- c. Penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan.
- d. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan. Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
- b. Perencanaan, mengatur dan megawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import dan teknis pembinaan sarana prasarana usaha perdagangan, pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), serta pengembangan manajemen promosi dagang di dalam dan di luar negeri.
- c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.

- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu.
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha.
- f. Pengoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pasar

Bidang pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar. Adapun Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusun rencana, penelitian serta pengemban pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengemban pasar.
- c. Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.
- d. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.
- e. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar.
- f. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar.
- g. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencan kerja.
- h. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
- i. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban keamanan dan kebersihan pasar.
- j. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dnegan sub dinas terkait.
- k. Pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturam pemungutan retribusi pengelolaan pasar.

- l. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- m. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha.
- n. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pasar terdiri dari Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL, dan Seksi Retribusi. Setiap Seksi masing-masing di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar.

1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan

dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja
- b. Penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pengembangan pasar.
- c. Penelitian retribusi pengelolaan pasar, penteragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar.
- d. Penyusunan program kerja.
- e. Pelaksanaan pelayanan umum.
- f. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
- g. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- h. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- i. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- j. Pelaksanaan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar.
- k. Pelaksanaan pengumpulan data di bidang retribusi pengelolaan pasar.
- l. Pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar.

- m. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SOP tugas Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan adalah sebagai berikut :

1. SOP pengembangan pasar dan pengawasan.
2. SOP petugas pemeliharaan pasar.
3. SOP petugas pemantau harga.
4. SOP petugas toilet.
5. SOP pencatatan pangan sehat.

2. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL

dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
- c. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar.
- d. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
- e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar.
- f. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- g. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan lingkungan pasar,
- h. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
- i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- j. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- k. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- l. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima.
- m. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang.

- n. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi.
- o. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan.
- p. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SOP tugas Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL adalah sebagai berikut :

- 1. SOP penyapu pasar.
- 2. SOP satuan tugas (SATGAS) pasar.
- 3. SOP petugas keamanan pasar (SATPAM) pasar.
- 4. SOP petugas toilet.
- 5. SOP pencegahan dan penanganan pasar.
- 6. SOP petugas parkir.

3. Seksi Retribusi

dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- b. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar.
- c. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi metrologi.
- d. Pemeliharaan dokumentasi penagihan secara teratur.
- e. Penyelesaian tunggakan-tunggakan dari wajib retribusi berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait.
- f. Penginventarisasian permasalahan dari penyajian bahan petunjuk pemecahan masalah.
- g. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- h. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- i. Pengolahan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan sub bagian lain yang terkait.
- j. Penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- k. Penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- l. Penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar.

- m. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pengelolaan Pasar yang ada di lingkungan pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait.
- n. Pelaksanaan tata pembukaan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SOP tugas Seksi Retribusi adalah sebagai berikut :

- 1. SOP petugas pemungut retribusi pasar.
- 2. SOP retribusi pasar.

7. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perindustrian. Adapun Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan di bidnag industri.
- b. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan.
- c. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong.
- d. Promosi produk industri.
- e. Penelitian pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri.
- f. Pemberian fasilitasi dan pengawasan standarisasi.
- g. Penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan pembina industri.
- h. Pelaksanaan fasilitas akses permodalan.
- i. Pemberian fasilitas kemitraan dan kerjasama.
- j. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta industri kreatif.
- k. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri.
- l. Penyusunan tata ruang industri.
- m. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.
- n. Pendataan, analisis dan desiminasi data industri.
- o. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri.

- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT ditetapkan dengan peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Kepala UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan di bidang Pengelolaan Pasar. Adapun Kepala UPT Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Perencanaan kegiatan UPT berdasarkan rencana operasional di lingkungan UPT Pengelola Pasar.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja UPT Pengelola Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi peralatan dan perlengkapan UPT Pengelola Pasar.
- e. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional UPT Pengelola Pasar.
- f. Pelaksanaan pelayanan informasi umum dan layanan pengaduan masyarakat.
- g. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

F. Kondisi Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru

Pasar Higienis Madani terletak di jalan Teratai Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Pasar Higienis memiliki luas 2.700 m². Pasar Higienis Madani merupakan salah satu pasar yang dikelola oleh pemerintah melalui dinas pasar Kota Pekanbaru. Pasar ini baru dibangun setelah keputusan Walikota Pekanbaru yang ditetapkan pada tanggal 14 April 2016. Sarana dan Prasarana yang telah diberikan baik dari pemerintah kota maupun dinas perdagangan dan perindustrian pada pasar higienis sampai detik ini berupa :

Sarana :

1. Jumlah Kios sebanyak 10 buah.
2. Jumlah Los sebanyak 140 buah.

Prasarana :

1. Parkiran sebanyak 1 buah.
2. WC Umum sebanyak 1 buah.
3. Tong sampah sebanyak 2 buah.
4. Pos Keamanan sebanyak 1 buah.
5. Petugas kebersihan sebanyak 2 orang.

Pasar Higienis adalah salah satu program pemerintah yang termasuk kategori pasar tradisional modern, dibangun pada tahun 2016 di Jalan Teratai, bekas bangunan SD 019 Pekanbaru. Di pasar higienis akan di tampung ratusan pedagang, terutama yang berjualan di sekitar jalan teratai yang selama ini dinilai mengganggu ketertiban jalan.

Pembangunan pasar tersebut di fungsikan untuk menata pedagang kaki lima dan memberdayakan masyarakat agar bekerja dan terlepas dari garis kemiskinan dan memenuhi taraf hidup layak, serta memiliki dampak positif terutama mengurangi angka kemiskinan, selain itu juga dapat memperbaiki beberapa pasar yang sudah ada, pembangunan tersebut juga untuk menata para pedagang kaki lima yang saat ini masih menempati trotoar bahkan badan jalan sebagai lokasi berdagang.

Di lihat dari letak daerah pasar higienis merupakan salah satu pasar yang tidak strategis untuk berdagang, kondisi perekonomian pedagang di pasar higienis sangat memprihatinkan dan tidak dapat membuat para pedagang bertahan lama untuk menempati Los dan Kios yang sudah ada.

Kondisi gedung yang masih dikelilingi pagar bekas SD 019 membuat pasar higienis terlihat sedikit tertutup dan tidak mudah terlihat oleh masyarakat luas, dan juga karena area parkir yang kurang luas sehingga tidak mempermudah kendaraan yang akan keluar masuk ke dalam pasar higienis. Masih terlihat banyak sampah yang menumpuk di depan pasar tersebut sehingga terlihat kotor, tidak tertata rapi dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, kemudian dikemukakan tentang pokok pembahasan yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Umur, dan Agama. Selain itu diperoleh juga data tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada bagian yang tersusun dalam bab V (lima) ini.

A. Identitas Responden

Dalam penelitian ini perlu terlebih dahulu ditinjau identitas responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang peneliti jadikan sebagai pertanyaan secara jelas dan lengkap. Adapun responden tersebut terdiri dari Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL dan Pedagang.

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja pada suatu pekerjaan atau jabatan tertentu. Tingkat pendidikan juga

mempengaruhi cara berfikir serta wawasan yang dimiliki seseorang. Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka disajikan identitas responden terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SD	3	50,0%
2.	SMP	-	-
3.	SMA	1	16,7%
4.	Diploma III (D3)	-	-
5.	Strata Satu (S1)	2	33,3%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel diatas (V.1) dapat dilihat bagaimana Tingkat Pendidikan Responden, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah Strata Satu (S1) yang berjumlah 2 orang atau 33,3%, selanjutnya pendidikan terakhir SMA berjumlah 1 orang atau 16,7%, dan pendidikan terakhir SD berjumlah 3 orang atau 50,0%.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden Pegawai Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel V.2.

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	4	66,7%
2.	Perempuan	2	33,3%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui bahwa terlihat secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, dengan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 4 orang atau 66,7%, dan Perempuan sebanyak 2 orang atau 33,3%. Jadi mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki.

3. Usia Responden

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak harus dilakukan. Seperti diketahui bahwa pegawai yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada pegawai yang lebih muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang umurnya lebih muda. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel V.3 adalah sebagai berikut :

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Tingkat Usia	Jumlah	Presentase
1.	25-35	1	16,7%
2.	36-46	1	16,7%
3.	47-57	4	66,7%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2020

Dari tabel V.3 diatas dapat di kita lihat bahwa responden yang paling dominan adalah berusia 23-35 Tahun berjumlah 1 orang atau 16,7%, selanjutnya usia 36-46 Tahun berjumlah 1 orang atau 16,7%, dan yang terakhir dari usia 47-57 Tahun berjumlah 4 orang atau 66,7%. Dapat disimpulkan untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 47-57 Tahun.

4. Agama

Selanjutnya akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan Agama, yaitu dapat dilihat pada tabel V.4 adalah sebagai berikut :

Tabel V.4 : Identitas Responden Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase
1.	Islam	6	100%
2.	Kristen Katolik	-	-
3.	Kristen Protestan	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel V.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 6 orang responden dalam penelitian ini mayoritas beragama Islam dengan jumlah 6 orang atau 100%, dan ke empat agama lainnya yakni Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha tidak di dapati dalam penelitian ini.

B. Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru

Evaluasi penyelenggaraan pasar teratai higienis madani kota pekanbaru sangat perlu dilakukan, sehingga proses pencapaian dari penyelenggaraannya bisa

diketahui tingkat keberhasilan dari kebijakan yang dilaksanakan. Mulai dari tahap pengkajian, perumusan sampai pelaksanaannya akan terlihat sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja bidang pasar tercapai dengan efektif dan efisien.

Dalam hal ini, evaluasi merupakan dimensi penting dalam pencapaian sebuah kebijakan. Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Evaluasi adalah hubungan masing-masing yang menunjuk pada aplikasi skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara spesifik evaluasi berkenaan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat kebijakan.

Penyelenggaraan adalah proses dimana penyusunan, pengelompokan dan pengaturan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupnya dan menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah di bentuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian kemudian menindak lanjuti peraturan walikota tersebut Pemerintah Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014. Adapun tugas dan fungsi perdagangan dan perindustrian sebagai berikut :

1. Bidang perindustrian mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsinya yakni, penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri, dan bantuan dalam rangka pengembangan dan penerapan industri.
2. Bidang perdagangan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsinya yakni, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan, bimbingan dan pengelolaan izin usaha perdagangan serta pengembangan perdagangan dalam maupun luar negeri.
3. Bidang pasar mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsinya yakni, tugas dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan, dan pengembangan pasar.

Pasar Tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagian lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energi, dan sumber daya lainnya. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama dikawasan perkotaan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional menjelaskan tentang pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual bertemu secara langsung.

Proses jual-beli biasanya melalui tawar-menawar harga dan harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih dapat ditawar, hal ini sangat berbeda dengan pasar modern umumnya pasar tradisional menyediakan bahan-bahan pokok serta keperluan rumah tangga. Lokasi pasar tradisional dapat berada ditempat yang terbuka atau bahkan di pinggir jalan. Ciri khas pasar tradisional adalah adanya tenda-tenda tempat penjual memasarkan dagangannya, serta pembeli yang berjalan hilir mudik untuk memilih dan menawar barang yang akan dibelinya.

Pasar tradisional higienis merupakan pasar bersifat tradisional yang dirancang sebagai pusat perdagangan dengan standar mutu produk sesuai dengan syarat kesehatan, kebersihan, dan higienitas bahan pangan serta syarat sanitasi lingkungan terawat. Seperti definisi higienis adalah kondisi lingkungan yang bersih dan sehat yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen untuk menjaga kesehatan manusia.

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya evaluasi penyelenggaraan pasar teratai higienis madani kota Pekanbaru, maka pada uraian berikut penulis akan jelaskan berdasarkan penyelenggaraan masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah hasil yang diinginkan telah tercapai, dimana setiap kebijakan yang dibuat mestilah efektif, sehingga yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai serta objek dari kebijakan tersebut juga sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Dunn, (2003 :429), efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang digarapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Untuk mengetahui indikator efektivitas dalam penelitian Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru ini, terdapat dua sub indikator yang telah ditanyakan dalam bentuk wawancara yang selanjutnya analisa sebagai berikut :

a. Adanya Target Dalam Penataan Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014, penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar agar berkembang, menguntungkan, dan saling memperkuat. Dalam hal penataan bangunan cukup baik di dalam pasar higienis, akan tetapi untuk pengukuran baik buruknya pelaksanaan, belum bisa dilakukan, sebab sampai saat ini pasar teratai higienis madani tidak beroperasi.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan target dalam penataan pasar. Penataan dilakukan dalam satu bulan sekali. Penataan tersebut dilakukan untuk para pedagang kaki lima. Penataan dalam hal ini bertujuan agar pedagang kaki lima dapat tertib berjualan di dalam gedung pasar higienis yang telah di persiapkan oleh pemerintah”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya target dalam penataan pasar higienis, Kepala Bidang Pasar menyatakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima dengan tertib berjualan di dalam gedung, akan tetapi dengan kurun waktu yang tidak lama hanya bertahan beberapa bulan saja.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Bagas Ndrahu selaku Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:00 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melakukan penataan, namun penataan tersebut belum optimal sehingga pedagang kaki lima masih belum tertib berjualan di dalam gedung pasar higienis yang telah dipersiapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya target dalam penataan pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan menyatakan sudah melakukan penataan terhadap pedagang yang akan berjualan di dalam gedung pasar higienis akan tetapi penataan tersebut belum optimal dan belum tertib berjualan.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syafruddin selaku Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:10 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan sudah melakukan penataan, penataan tersebut dilakukan juga oleh Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL, Penataan dilakukan untuk menertibkan para pedagang kaki lima agar tertib berdagang di dalam gedung yang sudah di persiapkan oleh pemerintah”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya target dalam penataan pasar, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL menyatakan Kepala Bidang Pasar sudah melakukan penataan pasar agar tertib berdagang di dalam gedung yang sudah di persiapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada pedagang Kaki Lima yang pernah menempati gedung pasar higienis tersebut : (Senin, 28 Desember 2020 – 10:13 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melakukan penataan terhadap gedung pasar higienis dan pedagang kaki lima yang akan menempati pasar higienis tersebut”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya penataan pasar higienis tersebut, pedagang kaki lima menyatakan Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL bahwa pernah melakukan penataan terhadap gedung dan pedagang yang akan menempati pasar higienis tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan terkait sub indikator penataan pasar adalah belum optimalnya penataan pasar yang dilakukan Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihaan, Ketertiban dan Pembinaan PKL bahwa masih belum sempurna dengan baik dalam menjalankan penataan tersebut.

b. Adanya Penempatan Pedagang

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau memperoleh hasil yang diinginkan. Kegiatan penempatan pedagang pasar tertai higienis, pedagang akan menempati lapak kios dan los pasar dilantai 1 (satu) diperuntukkan zonasi ikan basah, daging dan ayam, sedangkan lantai 2 (dua) diperuntukkan zonasi sayur-mayur, buah-buahan selain jenis jualan yang ada di lantai satu tersebut.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang Pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan pembagian penempatan pedagang umumnya untuk pedagang yang akan berjualan didalam gedung. Sudah ada pembagian letak los kios pada masing-masing tempatnya sesuai apa yang pedagang perjual belikan nanti. Dalam hal ini bertujuan agar pedagang dapat dengan tertib dan nyaman berjualan di pasar higienis madani”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya penempatan pedagang, Kepala Bidang Pasar menyatakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan penempatan pedagang terhadap para pedagang

kaki lima, agar pedagang kaki lima dapat dengan tertib berjualan di pasar higienis tersebut.

Dapat diketahui dari hasil wawancara yang peneliti lakukan menurut Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang Pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Pada tahun 2016 pasar higienis dipenuhi oleh pedagang, seluruh kios dan los sudah dipenuhi oleh pedagang. Pada saat itu pasar higienis kota pekanbaru sudah mulai aktif dan dipenuhi dengan aktifitas jual-beli”.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa pada saat itu terjadi penertiban pedagang oleh satpol pp disepanjang jalan teratai untuk mengisi pasar Higienis Madani, akan tetapi seiring berjalannya waktu pasar higienis madani Kota Pekanbaru sudah mulai tidak aktif berjalan, dengan banyaknya pedagang yang meninggalkan pasar higienis.

Selanjutnya, dapat diketahui hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang Pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Pada tahun 2016 di lokasi pasar higienis tersebut seluruh los dan kios yang disediakan untuk pedagang kosong, baik kios maupun los. Di lokasi hanya terlihat orang-orang yang hanya sekedar duduk dan mengobrol ditempat tersebut dan tidak ada aktifitas jual-beli lagi”.

Berdasarkan jawaban diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pada saat itu pasar higienis madani sudah mulai ditinggalkan oleh pedagang, hal ini akan memberikan dampak kerugian kepada pedagang yang berjualan di pasar higienis madani Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Bagas Ndrahu Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:00 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melakukan pembagian penempatan pedagang, penempatan itu telah dibagi pada tempatnya sesuai apa yang diperdagangkan oleh pedagang yang akan menempati los kios tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait adanya penempatan pedagang, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan menyatakan Kepala Bidang Pasar sudah melakukan Penempatan Pedagang sesuai dengan apa yang akan diperjual-belikan oleh pedagang tersebut.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syafruddin selaku Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:10 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan dan Pengawasan sudah melakukan penempatan pedagang untuk pedagang yang akan berjualan di dalam gedung”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek penempatan pedagang, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL menyatakan Kepala Bidang Pasar sudah melakukan penempatan tersebut.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada pedagang Kaki Lima yang pernah menempati gedung pasar higienis tersebut : (Senin, 28 Desember 2020 – 10:13 WIB)

“Penempatan pedagang sudah dilakukan, para pedagang merasa tidak nyaman karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik begitupun dengan pengunjung pasar”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya penempatan pedagang, Pedagang Higienis menyatakan Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL, memang sudah melakukan penempatan pedagang akan tetapi pedagang merasa tidak nyaman berdagang karena fasilitas yang diberikan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mereka.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada pedagang Kaki Lima yang pernah menempati gedung pasar higienis tersebut : (Senin, 28 Desember 2020 – 10:13 WIB)

“Setelah berjualan di dalam gedung pasar higienis tersebut para pedagang megkhawatirkan tidak dapat berjualan lagi karena modal dagangan tidak kembali. Bahwasannya modal yang mereka keluarkan setiap hari besar, sedangkan jual beli tidak setimpal”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek penempatan pedagang, pedagang higienis menyatakan bahwa penempatan yang dilakukan kurang berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan terkait sub indikator adanya penempatan pedagang adalah belum optimalnya Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL dalam mengatur dan mengajak pedagang kaki lima agar berjualan di dalam gedung tersebut, sehingga membuat para pedagang tidak nyaman karena keberadaan tempat tersebut tidak strategis untuk berjualan.

2. Efisiensi

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa “efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430)

a. Adanya Pengarahan Terhadap Pedagang

Pengarahan adalah fase kerja manajemen, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian berusaha memotivasi, membina, menangani konflik, dan kerjasama. Pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai

yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh dinas.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang Pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah melakukan pengarahan terhadap pedagang kaki lima agar berjualan di dalam gedung pasar higienis, seperti penghimbauan kepada para pedagang berupa himbauan tertulis, surat edaran, serta melalui satpol pp juga agar di paksa masuk kedalam gedung tersebut. Para pedagang tetap menolak mengikuti arahan atau ajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan kebijakan secara tegas akan tetapi para pedagang kaki lima nakal dan mengacuhkan himbauan yang telah dibuat oleh pemerintah”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek pengarahan terhadap pedagang, Kepala Bidang Pasar menyatakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan pengarahan terhadap pedagang dengan berbagai macam cara akan tetapi para pedagang menolak mengikuti arahan atau ajakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Bagas Ndrahu selaku Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:00 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melakukan pengarahan terhadap pedagang dengan memberikan himbauan tertulis kepada setiap pedagang agar menempati gedung yang telah disiapkan oleh pemerintah akan tetapi pedagang menghiraukannya”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek pengarahan terhadap pedagang, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan mengatakan Kepala Bidang Pasar sudah melakukan pengarahan terhadap pedagang dengan memberikan himbauan akan tetapi pedagang menghiraukannya.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syafruddin selaku Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:10 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan sudah melakukan pengarahan terhadap pedagang kaki lima agar berjualan di dalam gedung yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, itu dilakukan kepada pedagang yang sudah terdaftar di los kios tersebut dan pedagang kaki lima lainnya”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek pengarahan terhadap pedagang, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL menyatakan Kepala Bidang Pasar sudah melakukan pengarahan terhadap pedagang kaki lima agar berjualan di dalam gedung yang sudah di persiapkan oleh

pemerintah untuk pedagang yang sudah terdaftar di los kios maupun pedagang kaki lima lainnya.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada pedagang Kaki Lima yang pernah menempati gedung pasar higienis tersebut : (Senin, 28 Desember 2020 – 10:13 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL Pengarahan pedagang benar sudah dilakukan, dan diberikan himbauan serta teguran kepada pedagang kaki lima agar mau berjualan di dalam gedung pasar higienis”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengarahan pedagang, Pedagang higienis menyatakan Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL pengarahan pedagang sudah dilakukan dengan diberikan himbauan kepada pedagang kaki lima agar mau berjualan di dalam gedung pasar higienis.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan terkait sub indikator adanya pengarahan terhadap pedagang belum terlaksana dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah kebijakan dalam pelaksanaan program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dan pencapaian tujuan. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan

dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

a. Mendisiplinkan Pegawai

Usaha dilaksanakan untuk menciptakan suatu lingkungan kerja tertib, berdaya guna, berhasil guna melalui sistem pengaturan tepat.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang Pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan dalam mendisiplinkan pegawai, bentuk pengendalian diri pegawai atau stafnya akan tugas dan tanggungjawabnya agar mematuhi atau mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh atasannya”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait adanya mendisiplinkan pegawai, Kepala Bidang Pasar menyatakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan pendisiplinan yang akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang pegawai atau staf.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Bagas Ndrahu selaku Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:00 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melakukan pendisiplinan pegawai, memberikan sikap sukarela dalam menaati

peraturan dan norma yang berlaku, sehingga pegawai dapat mematuhi atau mengerjakan tugas-tugasnya”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya mendisiplinkan pegawai, Seksi Pengembangan dan Pengawasan menyatakan Kepala Bidang Pasar memberikan sikap dalam menaati peraturan sehingga pegawai dapat mematuhi atau mengerjakan tugas-tugasnya.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syafruddin Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:10 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan dan Pengawasan sudah melakukan dalam mendisiplinkan pegawai, memberikan sikap dalam menaati peraturan yang telah berlaku sehingga pegawai dapat mematuhi dan mengerjakan tugasnya masing-masing”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait adanya mendisiplinkan pegawai, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL menyatakan Kepala Bidang Pasar sudah melakukan pendisiplinan pegawai dengan memberikan sikap dalam menaati peraturan sehingga dapat mematuhi dan mengerjakan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan terkait sub indikator adanya mendisiplinkan pegawai adalah Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melaksanakan tugasnya dalam mendisiplinkan pegawainya

dalam bentuk pengendalian diri pegawai akan tanggungjawab tugas yang diberikan oleh atasannya.

b. Mendisiplinkan Para Pelaku Usaha

Mengusahakan supaya mematuhi dan mengikuti aturan yang telah berlaku. Dengan tindakan berupa nasehat, komunikasi secara langsung, dibina, diarahkan dalam seluruh kegiatan atau rencana dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal, dan berupa kegiatan yang mendorong pedagang dalam menaati tata tertib dan aturan yang telah berlaku.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang Pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan dalam mendisiplinkan para pelaku usaha yang berjualan dibadan jalan agar kembali berdagang digedung pasar higienis dan diberikan tindakan tegas untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi dan arahan pemerintah. Dalam hal ini upaya mendisiplinkan para pedagang kaki lima (PKL) gagal, akibat ulah pedagang yang mengacuhkan aturan pemerintah”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek mendisiplinkan para pelaku usaha, Kepala Bidang Pasar menyatakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan pendisiplinan terhadap pedagang kaki lima serta memberikan tindakan tegas terhadap pedagang kaki lima agar mematuhi perintah yang telah dibuat oleh pemerintah.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Bagas Ndrahu selaku Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:00 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL dalam mendisiplinkan para pelaku usaha, pedagang kaki lima perlu diarahkan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam menegakkan kedisiplinan harus terkesan tegas dan ketat itu diperuntukkan untuk pedagang kaki lima yang nakal dan bandel yang tidak mengikuti instruksi dan arahan dari pemerintah”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya mendisiplinkan para pelaku usaha, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan menyatakan Kepala Bidang Pasar sudah melakukan pendisiplinan terhadap pedagang kaki lima yang tidak mematuhi instruksi dari pemerintah.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syafruddin Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:10 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan sudah melakukan dalam mendisiplinkan para pelaku usaha, pedagang kaki lima yang nakal perlu diarahkan agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya mendisiplinkan para pelaku usaha, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL menyatakan Kepala Bidang Pasar sudah melakukan arahan dan bimbingan terhadap para pedagang kaki lima sesuai peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada pedagang Kaki Lima yang pernah menempati gedung pasar higienis tersebut : (Senin, 28 Desember 2020 – 10.13 WIB)

“Dalam mendisiplinkan para pelaku usaha, Kepala Bidang Pasar memang telah melakukan tugasnya dalam mendisiplinkan pedagang kaki lima.”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya mendisiplinkan para pelaku usaha, pedagang higienis menyatakan Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL memang telah melakukan tugasnya dalam mendisiplinkan pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan terkait sub indikator adanya mendisiplinkan para pelaku usaha adalah Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melakukan tugasnya dalam mendisiplinkan pedagang kaki lima sesuai dengan instruksi dan arahan yang telah dijalankan oleh pemerintah.

4. Pemerataan

Pemerataan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara adil dan bijaksana untuk memutuskan kebijakan selanjutnya. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. (Dunn, 2003:499)

a. Penetapan Sanksi Terhadap Pedagang

Didalam penegakan hukumnya bagi para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2014 tentang pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Dimana setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan Walikota Pekanbaru juga mengeluarkan peraturan mengenai sanksi terhadap pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu : PKL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Walikota akan dikenakan sanksi berupa: (a) 1. Teguran tertulis, 2. Pencabutan tanda daftar usaha, dan kartu kendali madani. 3. Penyitaan barang

dan dagangan sesuai ketentuan yang berlaku. (b). Penjatuhan sanksi dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang Pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Dalam upaya pencegahan pelanggaran aturan dalam perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sampai sekarang masih diterapkan dan digunakan sesuai dengan perda yang telah ditetapkan. Dalam hal ini berupaya agar setiap pelaku usaha tidak berbuat curang saat memperdagangkan dagangannya”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya penetapan sanksi terhadap pedagang, Kepala Bidang Pasar menyatakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan upaya pencegahan pelanggaran aturan terhadap pedagang saat mereka memperjualbelikan dagangannya dan disitu terdapat di dalam perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Bagas Ndrahu selaku Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:00 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melakukan pencegahan, dalam hal ini pemerintah mempunyai kebijakan sesuai dengan dikeluarkannya sebuah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya penetapan sanksi terhadap pedagang, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan menyatakan Kepala Bidang Pasar sudah melakukan pencegahan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syafruddin selaku Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL : Senin, 21 Desember 2020 – 10:10 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan sudah melakukan kebijakan dalam pencegahan pelanggaran aturan berlaku untuk pedagang kaki lima”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya penetapan sanksi terhadap pedagang, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL menyatakan Kepala Bidang sudah melakukan kebijakan dalam pencegahan pelanggaran aturan dan itu berlaku untuk pedagang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait sub indikator adanya penetapan sanksi terhadap pedagang dan pelaku usaha adalah Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah mengeluarkan Peraturan daerah berupa larangan, kewajiban serta Ketentuan Pidana.

b. Standar Yang Ditetapkan

Prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang Pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Mengenai SOP yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengenai hal itu tidak ada secara rinci karena SOP belum dibuat dalam arti ada kendala saat proses pembangunan pasar higienis tersebut. jadi saat ini dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini sendiri hanya melakukan pengarahan, tentang hal-hal apa saja yang diprioritaskan dalam pengawasan dan penataan kemudian dalam satu bulan sekali dapat laporan dalam pengelolaan pasar higienis tersebut”.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan terkait aspek adanya standar yang ditetapkan, Kepala Bidang Pasar menyatakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih kurangnya keterlibatann dari pemerintah terkait mengenai standar pengawasan pasar, dibuktikan dengan belum adanya standar tersebut, tetapi dari pihak dinas berusaha mengupayakan pengawasan tetap berjalan

meskipun pasar higienis tidak aktif kembali, semestinya dengan memberikan pengarahan tentang hal yang diutamakan dalam melakukan pengawasan.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Bagas Ndarhu selaku Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:00 WIB)

“Dalam hal ini penetapan standar pengawasan secara detail atau tertulis itu tidak ada, kami melakukan pengawasan di pasar higienis ini memang sudah wajib karena itu bagian dari tugas dan itu dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian jika ada ditemukan kejanggalan akan dimasukkan kedalam buku laporan.”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya standar yang ditetapkan, Seksi Pengembangan Pasar dan Pegawasan menyatakan bahwa tidak ada standar pengawasan (SOP) yang ditetapkan kepala bidang pasar melakukan pengawasan di pasar higienis disesuaikan dengan kewajiban dari organisasi itu sendiri, pengawasan dilakukan satu bulan dalm satu kali.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syafruddin selaku Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:10 WIB)

“Ada dari dinas sendiri melakukan pengawasan lamgsung satu kali dalam satu bulan di pasar higienis tersebut meskipun kini pasar higienis tersebut tidak aktif kembali”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek standar yang ditetapkan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL menyatakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, bahwa pengawasannya dilakukan satu kali dalam satu bulan hingga saat ini meskipun pasar higienis tersebut tidak aktif kembali.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait sub indikator adanya standar yang ditetapkan adalah bahwasannya standar pengawasan (SOP) secara detail maupun tertulis itu tidak ada, Dinas berusaha mengupayakan.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktifitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Willian N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. (Dunn, 2003:437)

a. Melaksanakan Pembinaan Pedagang

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membina keberadaan pasar dan pendirian pusat perbelanjaan. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan lebih baik dengan berbagai upaya untuk memotivasi.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Bapak Suhaedi selaku Kepala Bidang Pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan pembinaan pedagang terhadap pedagang kaki lima. Dapat diketahui bahwa jika membahas hal pembinaan yang dilakukan kepada pedagang kaki lima telah dilaksanakan kegiatan pembinaan ini oleh Satpol PP pada saat dilakukannya kegiatan penataan dan penempatan pedagang kaki lima. Namun pada saat itu masih dalam proses pelaksanaan dan ada beberapa kegiatan yang dianggap kurang optimal dikarenakan sikap kurang kooperatif dari PKL tersebut.”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya melaksanakan pembinaan pedagang, Kepala Bidang Pasar menyatakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan pembinaan, namun dapat diketahui bahwa didalam pelaksanaannya belum efektif dan sikap kurang kooperatif dari PKL tersebut.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Bagas Syafruddin Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:00 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, pembinaan pedagang kaki lima selama proses pemberdayaan tidak dapat berjalan sendiri, dalam hal ini kami bekerjasama dengan Satpol PP bertugas sebagai penertiban pedagang kaki lima”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya melaksanakan pembinaan pedagang, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan menyatakan bahwa pembinaan sudah dilakukan, selama proses pembinaan kami bekerjasama dengan Satpol PP yang bertugas sebagai penertiban pedagang kaki lima.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syafruddin selaku Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:10 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL Namun pada saat itu masih dalam proses pelaksanaan dan ada beberapa kegiatan yang dianggap kurang optimal dikarenakan sikap kurang kooperatif dari pedagang kaki lima tersebut”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya melaksanakan pembinaan pedagang, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL menyatakan Kepala Bidang Pasar sudah melakukan pembinaan namun pada saat itu masih dalam proses pelaksanaan dan ada beberapa kegiatan yang dianggap kurang optimal dikarenakan sikap kurang kooperatif dari pedagang kaki lima tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan terkait sub indikator melaksanakan pembinaan pedagang adalah dianggap kurang optimal yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

6. Ketetapan

Ketetapan merupakan suatu usaha untuk menempatkan sesuatu pada posisinya sesuai dengan porsi dan kecakapannya. Oleh karena itu ketetapan memerlukan penilaian dan kejelian yang seksama untuk menempatkan sesuatu hal tersebut pada tempatnya, sehingga pelaksanaan atau pencapaian tujuannya dapat terlaksana dengan baik dan benar. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. (Dunn, 2003:434)

a. Melakukan Pengawasan Secara Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan fisik lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh pengawas tersebut. dengan demikian dapat melihat bagaimana pengawasan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pengawasan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Bapak Suhardi selaku Kepala Bidang Pasar : (Senin, 21 Desember 2020 – 09:45 WIB)

“Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan pengawasan langsung terhadap pedagang pasar dan tempat lokasi tersebut meskipun pasar higienis tidak aktif kembali. Pengawasan langsung itu dilaksanakan

setiap bulan satu kali. Pengawasan itu dilakukan oleh Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL beserta bawahannya”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengawasan langsung, Kepala Bidang menyatakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan pengawasan secara langsung, dan pengawasan itu dilakukan satu bulan satu kali.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penelitian melakukan wawancara kepada Bapak Bagas Ndrahu selaku Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:00 WIB)

“Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melakukan pengawasan langsung terhadap pedagang pasar higienis. Pengawasan itu dilakukan satu bulan sekali”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait melakukan pengawasan secara langsung, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan menyatakan bahwa pengawasan tersebut sudah dilakukan setiap satu bulan sekali terhadap pasar.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syafruddin selaku Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL : (Senin, 21 Desember 2020 – 10:10 WIB)

“Kepala Bidang Pasar dan Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan sudah melakukan pengawasan langsung secara rutin setiap satu bulan sekali, pengawasan itu dilakukan kepada pedagang kaki lima”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek pengawasan secara langsung, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL menyatakan bahwa pengawasan itu sudah dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali, pengawasan itu dilakukan kepada pedagang kaki lima.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara kepada pedagang Kaki Lima yang pernah menempati gedung pasar higienis tersebut : (Senin, 28 Desember 2020 – 10:13 WIB)

“Pengawasan langsung itu sudah rutin dilakukan oleh Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sudah melakukan pengawasan, namun nyatanya pengawasan itu kurang berjalan seperti yang diharapkan”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait aspek adanya pengawasan secara langsung, pedagang pasar menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL kurang berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait sub indikator adanya pengawasan secara langsung adalah yang dilakukan Kepala Bidang Pasar,

Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL belum optimal dalam melakukan pengawasan langsung terhadap semua pedagang.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru adalah “Pasar higienis diciptakan untuk merelokasi pedagang kaki lima yang berjualan diluar pasar, karena kondisi disekitar jalan teratai banyak dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, yang mengakibatkan lingkungan sekitar jalan teratai kecamatan senapelan tidak bersih dan kumuh, sehingga terciptakanlah pasar higienis madani di jalan teratai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya waktu pasar higienis sudah tidak beroperasi, hingga saat ini sudah ditinggalkan oleh pedagang setelah beroperasi pada akhir tahun 2016 lalu.

Pasar higienis ternyata belum mampu untuk bertahan dan bersaing dengan pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Pasar higienis yang mulai kehilangan pembeli dan para pedagang banyak yang gulung tikar, hal ini disebabkan kurang tanggapnya pemerintah terhadap penyelenggaraan pasar tersebut. pada kenyataannya penjual maupun pembeli kurang berminat untuk memasuki lokasi pasar higienis yang alasannya karena barang dagangan mereka tidak lancar dan tidak laku di pasar tersebut.

Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan pasar tersebut adalah masalah penataan lokasi pedagang kaki lima, terletak pada kondisi bagaimana pengalokasian yang diperuntukkan bagi mereka, dan ini bukan hanya berarti menggiringnya pada suatu tempat tertentu, tetapi harus pula memperhatikan

masalah kelancaran yang dilakukan. Tidak semua pedagang bisa menempati pasar higienis dikarenakan kapasitas ruang yang tidak memadai untuk menampung sekian banyak pedagang kaki lima, sehingga pada akhirnya pedagang yang awalnya sudah aktif berjualan di pasar higienis tersebut turun kembali ke badan jalan, trotoar, dan didepan ruko, akibatnya pasar higienis tidak beroperasi lagi. Para pedagang lebih senang berjualan dipinggir jalan karena tanggapan mereka bahwa dagangannya lebih laku apabila dibandingkan berjualan di pasar higienis”.

C. Berdasarkan Hasil Wawancara dan Observasi yang Peneliti Lakukan Dapat Dirangkap Beberapa Hambatan dalam Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru

Dari hasil observasi dan wawancara diatas maka dapat penulis tarik kesimpulan mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani antara lain :

1. Tidak ada dukungan pedagang terhadap penyelenggaraan pasar Higienis. dapat dilihat kondisi pasar Higienis Madani Kota Pekanbaru saat ini sudah tidak beroperasi lagi dan sudah ditinggalkan oleh pedagang.
2. Belum ditetapkannya standar operasional prosedur (SOP), sehingga tugas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tidak diketahui dalam tingkat pencapaiannya, dimana SOP merupakan acuan untuk segala tindakan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana.

3. Bangunan pasar higienis tidak strategis dan terlalu tertutup untuk berjualan sehingga sulit untuk pedagang mempromosikan barang dagangannya.
4. Tidak semua pedagang bisa menempati pasar higienis itu dikarenakan kapasitas yang tidak memadai untuk menampung sekian banyak pedagang kaki lima yang berjualan di jalan dan trotoar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: Terkait penempatan pedagang belum berjalan dengan baik karena pedagang belum berjalan dengan baik karena pedagang yang berjalan di pasar Higienis Madani sudah tidak ada bahwasannya modal yang mereka keluarkan setiap hari besar, sedangkan jual beli tidak setimpal. Terkait pengarahannya adanya pengarahannya terhadap pedagang menghimbau para pedagang berupa himbauan tertulis, surat edaran, serta melalui satpol pp agar dipaksa masuk kedalam gedung pasar tersebut berjalan dengan baik namun para pedagang tidak mengikuti arahan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah sudah melakukan secara tegas tetapi para pedagang kaki lima mengacuhkan himbauan tersebut. Terkait adanya mendisiplinkan pegawai berjalan dengan baik namun pada tingkat pengawasan belum optimal dilakukan oleh Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, dan Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL. Terkait adanya mendisiplinkan para pelaku usaha belum berjalan dengan baik namun tindakan tegas terhadap pedagang sudah dilakukan dari pihak kepala Bidang Pasar. Terkait Standar yang ditetapkan belum berjalan dengan baik standar pengawasan yang dilaksanakan oleh bidang pasar hanya melalui aturan mengenai hal-hal yang diprioritaskan dalam pengawasan dan itu

bisa saja berdampak buruk terhadap tugas atau kinerja Bidang Pasar dalam menyelenggarakan pasar Teratai Higienis serta dari pihak pedagang pun mayoritas tidak mengetahui tentang standar pengawasan pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru. Terkait melaksanakan pembinaan pedagang belum berjalan dengan baik ada beberapa kegiatan dalam proses pelaksanaannya dianggap kurang optimal dikarenakan sikap kurang kooperatif dari pedagang tersebut. Terkait melakukan pengawasan secara langsung belum berjalan dengan baik bahwa pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, dan Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL kurang berjalan dengan semestinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian adalah :

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Bidang Pasar, Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan pasar Higienis Madani Kota Pekanbaru dengan efektif dan efisien dan meningkatkan optimalisasi pasar, agar pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan pasar Higienis dapat berjalan dengan tujuan yang diinginkan.
2. Seharusnya para pedagang kaki lima ditempatkan yang layak untuk tidak berjualan di jalan maupun trotoar khususnya kepada pedagang kaki lima yang nakal dan kurang disiplin yang tidak mengikuti arahan

pemerintah, sehingga dapat menghambat proses penyelenggaraan pasar tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Arikunto dan Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- _____, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- G.R. Terry, 2011. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama.
- Jones, Charles. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Kansil, CST, dan Cristine 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Masitoh, E. 2013. *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*. Jurnal PMI Vol. X. No 2, Maret 2013.
- Moleong, J. Lexy., 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Sankri Buku I Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara

- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Bar)1* . Jakarta, Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 3*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo.
- Subarsono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- _____. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama.
- _____. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Mandar Maju.
- _____. 2017. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.
- Wicaksono Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta, Graham Ilmu.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2010. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta, CAPS.

Yusuf, A. Muri., 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta, Kencana.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 213 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Teratai Higienis Madani Kecamatan Senapelan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Laporan Hasil Penelitian (Skripsi), Laporan Kertas Kerja Mahasiswa (LKKM), Edisi Revisi, Badan Penerbit Fisipol UIR, Pekanbaru, Tahun 2013.

Jurnal:

Sirvia, Junisa Gina. 2017. *Analisa Penyelenggaraan Pasar Teratai Higienis Madani Kota Pekanbaru*.

Rujukan Elektronik :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>